

Analisis *Financial Distress* dan Faktor yang Mempengaruhinya pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah di Provinsi Aceh

Hismendi^{1*}, Rahmi Raihan², Lianti³, Safaruddin⁴

^{1,2,3,4} Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B. Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

¹*hismendi@pnl.ac.id (penulis korespondensi)

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*) terhadap *financial distress* pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Aceh. Data penelitian berupa laporan keuangan triwulanan seluruh BPRS selama periode 2019–2024, dianalisis menggunakan metode regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel RGEC yang terdiri atas NPF, GCG, ROA, BOPO, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* dengan nilai McFadden R² sebesar 0,8357, yang berarti model mampu menjelaskan lebih dari 80% variasi kondisi *distress*. Secara parsial, NPF berpengaruh positif signifikan pada taraf 10%, ROA berpengaruh negatif signifikan, dan BOPO berpengaruh positif signifikan, sedangkan GCG berpengaruh negatif tidak signifikan serta CAR berpengaruh positif tidak signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa profitabilitas dan efisiensi operasional merupakan faktor utama dalam menekan risiko *distress*, sementara tata kelola dan kecukupan modal belum berperan optimal. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penguatan strategi manajemen risiko, peningkatan efisiensi, serta perbaikan tata kelola BPRS guna memperkuat ketahanan keuangan.

Kata kunci— BPRS, Financial Distress, RGEC, Regresi Logistik.

Abstract— This study aims to determine the effect of RGEC factors (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital*) on financial distress at Sharia People's Economic Banks (BPRS) in Aceh Province. The research data, in the form of quarterly financial reports of all BPRS during the 2019–2024 period, were analyzed using a binary logistic regression method. The results showed that simultaneously the RGEC variables consisting of NPF, GCG, ROA, BOPO, and CAR had a significant effect on financial distress with a McFadden R² value of 0.8357, which means the model is able to explain more than 80% of the variation in distress conditions. Partially, NPF had a significant positive effect at the 10% level, ROA had a significant negative effect, and BOPO had a significant positive effect, while GCG had an insignificant negative effect and CAR had an insignificant positive effect. These findings confirm that profitability and operational efficiency are the main factors in reducing the risk of distress, while governance and capital adequacy have not played an optimal role. This study provides important implications for strengthening risk management strategies, increasing efficiency, and improving BPRS governance to strengthen financial resilience.

Keywords— BPRS, Financial Distress, RGEC, Logistic Regression.

I. PENDAHULUAN

Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/BPRS) merupakan lembaga keuangan yang berperan menyediakan layanan intermediasi keuangan bagi masyarakat di tingkat lokal, dengan fokus utama mendukung pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten mencabut izin usaha sejumlah BPR/BPRS akibat kondisi keuangan yang memburuk dan tidak dapat dipulihkan, dengan rata-rata 6–7 bank per tahun. Di Provinsi Aceh, pencabutan izin pertama terjadi pada BPRS Hareukat pada 11 Oktober 2019. Selanjutnya, BPR Aceh Utara dicabut izinnya pada 4 Maret 2024, diikuti oleh BPRS Kota Juang (Perseroda) pada 29 November 2024, karena menghadapi permasalahan keuangan serius sehingga tidak dapat disehatkan kembali [1].

Beberapa penyebab terjadinya kebangkrutan pada BPR/S di Indonesia adalah: 1) Kondisi keuangan yang buruk; 2)

Pembiayaan bermasalah/kredit macet; 3) Manajemen risiko yang tidak efektif; 4) Penyalahgunaan dana (*fraud*); dan 5) Ketidakmampuan mengikuti digitalisasi layanan keuangan yang berkembang pesat [2]. Penelitian ini difokuskan pada aspek keuangan BPRS. Fenomena kebangkrutan bank umumnya diawali oleh kondisi *financial distress* atau kesulitan keuangan. Kondisi ini terjadi ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Apabila *financial distress* berlanjut hingga mengarah pada kebangkrutan, maka beban bank akan semakin berat akibat timbulnya berbagai biaya tambahan. Untuk meminimalisasi risiko tersebut, diperlukan penerapan *Early Warning System* (EWS) yang dapat mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini.

Financial distress berhubungan dengan masalah kesehatan bank jika ditinjau dari sisi keuangan. Sesuai POJK Nomor 4/POJK.03/2016 kesehatan bank diukur dengan metode RGEC yang terdiri dari *Risk profile, GCG, Earnings, dan Capital*. *Risk profile* diukur dengan menggunakan Non Performing

Financing (NPF) sebagai indikator pembiayaan bermasalah. *Good Corporate Governance* (GCG) antara lain dinilai dari struktur kepemilikan, jumlah Dewan Pengawas Syariah, komisaris independen, dan komite audit. *Earnings* mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba yang dapat diketahui dari *Return on Assets* dan efisiensi bank yang diukur dengan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). *Capital* digunakan untuk mengetahui kecukupan modal bank yang biasanya diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) [3].

Penelitian ini menggunakan RGEC sebagai variabel prediktor untuk menganalisis pengaruhnya terhadap financial distress sebagai variabel respon. Secara umum, pengukuran financial distress dapat dilakukan dengan berbagai proksi, antara lain Altman Z-Score, Ohlson O-Score, serta rasio-rasio keuangan tertentu. Model Altman Z-Score awalnya dikembangkan untuk memprediksi kebangkrutan pada perusahaan manufaktur di Amerika Serikat, kemudian diperluas penggunaannya pada perusahaan publik maupun non-publik. Sementara itu, model Ohlson O-Score berbasis regresi logistik dan bertujuan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan secara umum (non-keuangan). Kedua model tersebut dinilai kurang relevan diterapkan pada BPRS karena struktur laporan keuangannya berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan proksi financial distress yang merujuk pada Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PKBS) sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/POJK.03/2014. Pemilihan indikator ini dinilai lebih tepat karena PKBS merupakan instrumen resmi yang digunakan oleh OJK untuk menilai tingkat kesehatan perbankan di Indonesia, termasuk BPRS. Dengan demikian, penggunaan proksi tersebut tidak hanya sesuai dengan karakteristik laporan keuangan BPRS, tetapi juga memiliki legitimasi regulasi dan relevansi praktis dalam konteks industri perbankan nasional. Dalam penelitian ini, financial distress diperlakukan sebagai variabel dummy, dengan nilai 1 untuk bank yang mengalami financial distress dan 0 untuk bank yang berada dalam kondisi non-financial distress.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1). Apakah RGEC yang diwakili oleh NPF, GCG, ROA, BOPO, dan CAR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* pada BPRS di Provinsi Aceh. 2). Apakah RGEC yang diwakili oleh NPF, GCG, ROA, BOPO, dan CAR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* pada BPRS di Provinsi Aceh.

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1). Pengaruh RGEC yang diwakili oleh NPF, GCG, ROA, BOPO, dan CAR secara simultan terhadap *financial distress* pada BPRS di Provinsi Aceh. 2). Pengaruh RGEC yang diwakili oleh NPF, GCG, ROA, BOPO, dan CAR secara parsial terhadap *financial distress* pada BPRS di Provinsi Aceh.

Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), yang sebelumnya bernama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, mengalami perubahan nomenklatur setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 12 Januari 2023. BPR Syariah adalah jenis Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung dan tidak dapat diubah kegiatan usahanya menjadi BPR, sebaliknya BPR dapat diubah menjadi BPR Syariah apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan. BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. BPR Syariah juga dapat melakukan penggabungan dengan lembaga keuangan mikro dan jika terjadi maka Bank hasil Penggabungan wajib menjadi BPR Syariah [4].

Menurut Pasal 21 UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK, kegiatan usaha BPR Syariah meliputi penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, atau investasi dengan akad syariah; penyaluran dana melalui pembiayaan berbasis akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, qardh, ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik, maupun hawalah; penempatan dana dan penerimaan dana dari bank syariah lain; layanan transfer dana dan pengalihan piutang; serta penyediaan produk atau layanan lain sesuai prinsip syariah dengan persetujuan OJK [4].

Financial Distress

Financial distress dan kebangkrutan merupakan kondisi yang berbeda tetapi secara umum keduanya sering dianggap sama. Kebangkrutan sebagai suatu kegagalan yang dapat diartikan sebagai kegagalan ekonomi (*economic distress*) dan kegagalan keuangan (*financial distress*). *Economic distress* merupakan kondisi perusahaan dimana laba lebih kecil daripada biaya modal. Adapun *financial distress* adalah kondisi perusahaan yang kesulitan dana baik dalam arti kas atau modal kerja. Sebagian *asset liability management* sangat berperan dalam menjaga agar perusahaan tidak mengalami *financial distress*. *Insolvensi* bisa pula diartikan sebagai *financial distress* yang membedakan antara dasar arus kas dan dasar saham [5].

Kebangkrutan pada dasarnya dapat diidentifikasi sejak dini, di mana *financial distress* merupakan indikasi awal terjadinya kebangkrutan. Oleh karena itu, tindakan preventif sangat penting agar perusahaan dapat bertahan dan tetap bersaing. Salah satu cara mengenali potensi kebangkrutan adalah melalui laporan keuangan yang dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai kondisi keuangan perusahaan, khususnya dengan menggunakan analisis model prediksi *financial distress* [6]. *Financial distress* merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum perusahaan dinyatakan bangkrut atau dilikuidasi, dapat dimulai dari kesulitan likuiditas jangka pendek sebagai bentuk *financial distress* ringan hingga mencapai kondisi terberat berupa pernyataan kebangkrutan.

Proksi *financial distress* dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dari OJK berupa Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PKBS) yaitu POJK No. 20/POJK.03/2014. Penilaiannya

secara kuantitatif mencakup beberapa aspek utama yaitu: 1) Rentabilitas (profitabilitas), menggunakan ROA sebagai proksinya; 2) Efisiensi operasional, menggunakan BOPO sebagai proksinya; 3) Kualitas Aset, proksinya adalah NPF; dan 4) Permodalan diukur dengan CAR.

Penetapan bobot pada masing-masing rasio keuangan dilakukan berdasarkan relevansi fungsional masing-masing rasio terhadap kondisi keuangan bank. ROA diberikan bobot tertinggi sebesar 30% karena mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari asetnya, dan menjadi indikator utama profitabilitas. BOPO bobotnya 25% karena merupakan ukuran efisiensi yang sangat menentukan daya tahan operasional bank. NPF bobotnya 25% karena mencerminkan risiko pembiayaan yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan bank. CAR diberi bobot 20% sebagai ukuran kecukupan modal terhadap risiko yang dihadapi.

Selanjutnya, tingkat kesehatan BPRS diurutkan berdasarkan peringkat yang mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /SEOJK.03/2019 dengan ketentuan sebagaimana yang tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Peringkat Tingkat Kesehatan BPRS

Peringkat	Kategori Kesehatan	Deskripsi	Potensi <i>Financial Distress</i>
1	Sangat Sehat	Kondisi keuangan sangat kuat, indikator kinerja di atas ambang batas, dan sangat mampu mengatasi risiko	Tidak
2	Sehat	Kondisi baik, indikator kinerja sehat dan masih dalam batas aman	Tidak
3	Cukup Sehat	Beberapa indikator ada kelemahan, namun dalam batas toleransi. Perlu pembenahan	Mengarah ke <i>distress</i>
4	Kurang Sehat	Masalah cukup serius pada beberapa indikator; perlu perhatian intensif	Ringan-sedang
5	Tidak Sehat	<i>Financial distress</i> , berisiko tinggi, dan butuh tindakan korektif segera	Berat/akut

Sumber: Surat Edaran OJK Nomor 28 /SEOJK.03/2019

RGEC

Sesuai POJK Nomor 4/POJK.03/2016 kesehatan bank diukur dengan metode RGEC yang terdiri dari *Risk profile*, *GCG*, *Earnings*, dan *Capital* [7]. RGEC menggantikan metode CAMELS yang digunakan sebelumnya dengan pendekatan *Risk-Based Bank Rating*.

Risk Profile

Profil risiko (*Risk profile*) dapat diukur dengan rasio NPF sebagai indikator pembiayaan bermasalah. NPF mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah, sehingga menjadi indikator penting dari risiko pembiayaan [8]. Semakin tinggi NPF, maka semakin buruk kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antarbank), sehingga meningkatkan risiko bank dalam menghadapi permasalahan keuangan.

Peningkatan NPF pada suatu bank dapat menurunkan jumlah simpanan yang berhasil dihimpun, karena kepercayaan masyarakat untuk menabung atau menempatkan dana berkurang. Nasabah cenderung khawatir dananya tidak dapat dikembalikan atau hanya memperoleh bagi hasil dalam jumlah kecil [9]. NPF yang tinggi juga berdampak pada meningkatnya

kebutuhan pembentukan cadangan kerugian, menurunnya laba usaha, serta rendahnya kemampuan bank untuk menambah modal. Kondisi ini berimplikasi pada penurunan bagi hasil yang diterima nasabah, sehingga mendorong mereka untuk memindahkan dana ke bank lain atau ke instrumen investasi yang lebih menguntungkan [10]. Bank dengan NPF yang tinggi lebih berpotensi menghadapi *financial distress*. Kriteria peringkat NPF sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /SEOJK.03/2019.

Tabel 2. Kriteria peringkat *Non Performing Financing* BPRS

Keterangan	Nilai NPF
Peringkat 1	$NPF \leq 7\%$,
Peringkat 2	$7\% < NPF \leq 10\%$
Peringkat 3	$10\% < NPF \leq 13\%$
Peringkat 4	$13\% < NPF \leq 16\%$
Peringkat 5	$NPF > 16\%$

Sumber: SE Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /SEOJK.03/2019

Hasil penelitian terdahulu kesimpulannya berbeda-beda. Penelitian [11][12] menyimpulkan NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Penelitian [13][14] hasilnya berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Penelitian [15][16] hasilnya berpengaruh positif namun tidak signifikan.

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip tata kelola yang berfungsi memberikan pengarahan dan pengawasan agar perusahaan dapat berjalan secara seimbang dalam penggunaan kekuatan dan wewenangnya, serta mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada para pemangku kepentingan. GCG juga berperan sebagai mekanisme pengendalian untuk memastikan kegiatan perusahaan tetap berada dalam batas yang wajar sesuai aturan dan prinsip yang berlaku. GCG dalam perbankan adalah sistem tata kelola yang diterapkan untuk mengelola bank secara efektif dan efisien, serta untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. GCG menekankan pada prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Implementasi GCG sangat penting bagi bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan stabilitas serta memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Proksi dari GCG dalam penelitian ini adalah jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan jumlah komisaris yang merupakan proksi kuantitatif. DPS bertugas menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, dimana dalam teori *stakeholder* bertindak sebagai pelindung kepentingan masyarakat muslim. Selanjutnya sesuai teori agensi, semakin banyak anggota dewan komisaris, semakin besar kemampuan mereka mengawasi tindakan oportunistik manajemen sehingga dapat berperan sebagai indikator pengawasan internal.

Hasil penelitian sebelumnya kesimpulannya berbeda-beda. Penelitian [11] menyimpulkan GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*. Penelitian [12] hasilnya berpengaruh positif signifikan. Penelitian [13][14] [16] [17] hasilnya berpengaruh positif namun tidak signifikan.

Earning

Earning merupakan kemampuan bank menghasilkan laba secara berkelanjutan. Indikator umum yang digunakan adalah ROA dan BOPO. *Return on Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas bank. Rasio ini juga menunjukkan tingkat efektivitas manajemen memperoleh laba dari hasil penjualan atau pendapatan investasi [18]. ROA pada perbankan termasuk BPRS dapat dihitung dengan rumus [8]:

$$ROA = (EBT / TA) \tag{1}$$

Earning Before Tax (EBT) merupakan laba BPRS sebelum pajak dan telah memperhitungkan kekurangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPA). EBT dihitung berdasarkan akumulasi selisih laba atau rugi sebelum pajak selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. Total Aset (TA) merupakan total aset yang dimiliki oleh BPRS. Peringkat ROA yang ideal untuk BPRS adalah di atas 1,45% [8]. ROA yang positif mengindikasikan aset bank yang digunakan untuk pembiayaan memberikan keuntungan, sebaliknya jika ROA negatif berarti aset yang digunakan belum memberikan keuntungan. Peningkatan ROA akan menurunkan rasio pembiayaan bermasalah [19]. Bank dengan ROA yang tinggi seharusnya peluangnya lebih kecil untuk menghadapi *financial distress*. Kriteria peringkat ROA dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Kriteria peringkat *Return on Asset* BPRS

Keterangan	Nilai CAR
Peringkat 1	ROA > 1,450%
Peringkat 2	1,215% < ROA ≤ 1,450%
Peringkat 3	0,999% < ROA ≤ 1,215%
Peringkat 4	0,765% < ROA ≤ 0,999%
Peringkat 5	ROA ≤ 0,765%

Sumber: SE Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /SEOJK.03/2019

Hasil penelitian sebelumnya memiliki kesimpulan berbeda-beda. Penelitian [13][11][12][15][16] menyimpulkan ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*. Penelitian [14] berpengaruh positif signifikan, sedangkan penelitian [17] berpengaruh positif namun tidak signifikan.

Selanjutnya, Rasio Efisiensi Operasional (REO) merupakan perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Beban Operasional (BO) merupakan beban yang dikeluarkan oleh BPRS untuk membiayai operasionalnya, tidak termasuk bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Pendapatan Operasional (PO) merupakan pendapatan yang diterima oleh BPRS setelah dikurangi dengan bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Rasio ini sering disebut dengan rasio BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Angka REO yang ideal untuk BPRS maksimal 83%. BOPO merupakan indikator efisiensi operasional bank yang dihitung dengan rumus [8]:

$$BOPO = \text{Beban Operasional} / \text{Pendapatan Operasional} \tag{2}$$

Bank yang efisien dianggap mampu mengelola input untuk menghasilkan output yang semakin baik. Pengelolaan ini termasuk manajemen risiko pembiayaan, sehingga bank efisien mampu memanfaatkan input untuk menghasilkan output yang optimum sehingga risiko pembiayaannya baik [19].

Tabel 4. Kriteria peringkat BOPO BPRS

Keterangan	Nilai BOPO
Peringkat 1	BOPO ≤ 83%
Peringkat 2	83% < BOPO ≤ 85%
Peringkat 3	85% < BOPO ≤ 87%
Peringkat 4	87% < BOPO ≤ 89%
Peringkat 5	BOPO > 89%

Sumber: SE Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /SEOJK.03/2019

Capital Adequacy Ratio

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) disebut juga dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengukur kecukupan modal BPRS dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku. Angka ideal CAR untuk BPRS minimal 15% [8]. Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank untuk menanggung resiko dari setiap pembiayaan/aktiva produktif yang berisiko. CAR untuk BPRS dapat dihitung dengan rumus [8]:

$$CAR = (\text{Modal Inti} + \text{Pelengkap}) / \text{ATMR} \tag{3}$$

Modal dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) diatur dalam POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum. Modal bank berperan menyangga risiko dan dapat digunakan pula menutupi tingkat pengembalian yang tidak sesuai harapan dengan tetap bisa melanjutkan kegiatan operasinya.

CAR berperan penting dalam menyerap risiko khususnya risiko pembiayaan. Rasio CAR BPRS yang tinggi berarti bahwa kemampuannya dalam mengelola dana sangat baik, sehingga akan menurunkan rasio pembiayaan bermasalah. Dari kegiatan operasional bank tidak semua jasa yang dilakukannya mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Sebagai contoh jika ada kreditur yang status pinjamannya tidak lancar maka hal itu akan menghambat kegiatan operasional bank dan dapat menimbulkan risiko kerugian [19]. Kriteria peringkat CAR sesuai SE Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /SEOJK.03/2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Kriteria peringkat *Capital Adequacy Ratio* BPRS

Keterangan	Nilai CAR
Peringkat 1	CAR ≥ 15%
Peringkat 2	13,5% ≤ CAR < 15%
Peringkat 3	12% ≤ CAR < 13,5%
Peringkat 4	8% ≤ CAR < 12%
Peringkat 5	CAR < 8%

Sumber: SE Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /SEOJK.03/2019

Hasil penelitian sebelumnya kesimpulannya berbeda-beda. Penelitian [12] menyimpulkan CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*. Penelitian [11][15] menyimpulkan CAR berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Penelitian [14][17] hasilnya berpengaruh positif signifikan, sedangkan penelitian [13] positif namun tidak signifikan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian ini adalah BPRS di Provinsi Aceh. Pengamatan dilakukan terhadap *financial distress* serta faktor-

faktor yang diperkirakan mempengaruhinya yang merupakan proksi dari RGEC. Proksi ini terdiri NPF, GCG, ROA, dan CAR. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari OJK, BPRS di Provinsi Aceh, serta sumber-sumber lain yang relevan. Periode penelitian ditetapkan sejak Januari 2021 hingga Desember 2024 dengan menggunakan data triwulanan untuk seluruh variabel penelitian.

Populasi penelitian ini adalah seluruh BPRS yang pernah beroperasi di Provinsi Aceh selama periode penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah populasi adalah 12 BPRS.

Tabel 6. Populasi Penelitian

No.	Nama BPRS	Lokasi
1	PT BPRS Baiturrahman	Aceh Besar
2	PT BPRS Hikmah Wakilah	Banda Aceh
3	PT BPRS Taman Indah Darussalam	Banda Aceh
4	PT BPRS Mustaqim Aceh (Perseroda)	Banda Aceh
5	PT BPRS Artha Aceh Sejahtera	Banda Aceh
6	PT BPRS Tengku Chiek Dipante	Pidie
7	PT BPRS Rahmania Dana Sejahtera	Bireuen
8	PT BPRS Kota Juang (Perseroda)	Bireuen
9	PT BPRS Gayo (Perseroda)	Aceh Tengah
10	PT BPRS Rahmah Hijrah Agung	Lhokseumawe
11	PT BPRS Adeco	Langsa
12	PT BPRS Serambi Mekah	Langsa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (31 Desember 2023, diolah)

Penarikan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik *sampling* dengan kriteria tertentu. Kriterianya adalah: 1) Telah beroperasi sebagai BPRS sebelum 1 Januari 2021. 2) Tidak dicabut izinnya selama periode penelitian. 3) Memiliki data yang lengkap sesuai kebutuhan penelitian. Berdasarkan tabulasi pada Tabel 7 dapat diketahui jumlah sampel sebanyak 9 BPRS. Sementara jumlah observasi adalah 176 karena pengamatan dilakukan selama 4 tahun dengan data triwulan.

Tabel 7. Proses Pemilihan Sampel

Keterangan/Kriteria	Tidak Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat
Populasi		12
Beroperasi sebelum 1 Januari 2021	2	10
Tidak dicabut izinnya selama periode penelitian	1	9
Memiliki data yang lengkap sesuai kebutuhan penelitian	0	9
Jumlah sampel		9
Jumlah pengamatan/observasi (9 x 4 x 4)		144

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (31 Desember 2024, diolah)

BPRS yang tidak memenuhi kriteria-1 adalah BPRS Mustaqim Aceh (Perseroda) dan BPRS Artha Aceh Sejahtera. Kedua BPRS ini sebelumnya merupakan BPR konvensional, kemudian beralih menjadi syariah. BPRS Mustaqim Aceh berubah menjadi syariah tanggal 1 September 2021 dan BPRS Artha Aceh Sejahtera pada Januari 2023. Selanjutnya, yang tidak memenuhi kriteria-2 adalah BPRS Kota Juang (Perseroda) karena dicabut izinnya tanggal 29 November 2024. Nama-nama BPRS yang terpilih menjadi sampel secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 BPRS yang Terpilih Menjadi Sampel

No.	Nama BPRS	Lokasi
1	PT BPRS Baiturrahman	Aceh Besar
2	PT BPRS Hikmah Wakilah	Banda Aceh
3	PT BPRS Taman Indah Darussalam	Banda Aceh
4	PT BPRS Tengku Chiek Dipante	Pidie
5	PT BPRS Rahmania Dana Sejahtera	Bireuen
6	PT BPRS Gayo (Perseroda)	Aceh Tengah
7	PT BPRS Rahmah Hijrah Agung	Lhokseumawe
8	PT BPRS Adeco	Langsa
9	PT BPRS Serambi Mekah	Langsa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (31 Desember 2024, diolah)

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis maka pengukuran variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
<i>Financial Distress</i>	Tahap penurunan situasi pendanaan yang terjadi sebelum perusahaan dinyatakan bangkrut maupun likuidasi	Dummy: 1= (<i>Financial Distress</i>) 0= (<i>Non Financial Distress</i>)	Nominal
<i>Non Performing Financing (NPF)</i>	Kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan	NPF = (Jumlah Pembiayaan Bermasalah / Jumlah Pembiayaan)	Rasio
<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	Prinsip untuk memberikan pengarahan dan pengawasan agar perusahaan dapat berjalan seimbang dalam kekuatan dan wewenangnya.	GCG = Jumlah DPS + Jumlah Komisaris	Rasio
<i>Return on Asset (ROA)</i>	Kemampuan bank dalam mencari keuntungan dalam suatu periode tertentu dengan aset yang dimilikinya	ROA = (EBT / TA)	Rasio
BOPO	Rasio efisiensi operasional merupakan perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional	BOPO = Beban Operasional / Pendapatan Operasional	Rasio
<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	Kecukupan modal BPRS dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku	CAR = (Modal Inti + Pelengkap) / ATMR	Rasio

Teknis Analisis Data

Analisa data penelitian ini menggunakan model regresi logistik biner karena variabel responnya berupa *dummy*. Regresi logistik biner (*binary logistic regression*) adalah metode statistika yang mempelajari tentang pola hubungan secara matematis antara satu variabel respon (Y) yang bersifat nominal dengan satu atau lebih variabel prediktor (X). Perbedaan mendasarnya dengan model regresi linier adalah pada variabel responnya. Variabel respon pada regresi logistik merupakan variabel biner, sedangkan untuk regresi linier, variabel responnya minimal berskala interval. Perbedaan lainnya terlihat pada pemilihan model parametrik dan asumsi-asumsi yang mendasari kedua model [20]. Regresi logistik lebih fokus memprediksi probabilitas hasil dan tidak bergantung pada asumsi klasik seperti normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Namun memerlukan uji

multikolinearitas untuk memastikan model yang akurat dan dapat diinterpretasikan.

Tahapan yang dilakukan dalam regresi logistik biner untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan model yaitu:

$$\ln \frac{FD_{1,t}}{1 - NFD_{1,t}} = \beta_0 + \beta_1 NPF_{i,t} + \beta_2 GCG_{i,t} + \beta_3 ROA_{i,t} + \beta_4 BOPO_{i,t} + \beta_5 CAR_{i,t}$$

Keterangan:

FD = *Financial Distress*

NFD = *Non Financial Distress*

NPF = *Non Performing Financing*

GCG = *Good Corporate Governance*

ROA = *Return On Asset*

BOPO = Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

CAR = *Capital Adequacy Ratio*

β_0 = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = koefisien regresi variabel prediktor

t = Waktu

i = Nama BPRS

2. Uji multikolinearitas untuk memastikan model akurat dan dapat diinterpretasikan

3. Pengujian *Goodness of Fit* untuk mengetahui kesesuaian model dalam menjelaskan pengaruh dari proksi RGEC terhadap *financial distress* BPRS di Aceh pada tingkat signifikansi (α) = 5%. Hipotesis yang digunakan adalah:

- a. H_0 : model yang dibentuk fit (tidak terdapat perbedaan antara hasil observasi dengan hasil prediksi model)
- b. H_a : Model yang dibentuk tidak fit (terdapat perbedaan antara hasil observasi dengan hasil prediksi model)
- c. Statistik uji yang digunakan adalah statistik uji *C* dengan keputusan tolak H_0 jika $C > \chi^2_{0,05;8}$ atau *p-value* < 0,05
- d. Jika keputusan menolak H_0 , maka model yang terbentuk tidak sesuai dalam menjelaskan pengaruh X terhadap Y.

4. Pengujian parameter secara simultan dilakukan dengan menghitung nilai statistik uji G. Hipotesis uji simultan adalah sebagai berikut:

- a. $H_0 : \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$; tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara simultan yang terdiri dari proksi RGEC terhadap terhadap *financial distress* BPRS di Aceh.
 H_a : minimal terdapat satu $\beta_j \neq 0$; minimal terdapat satu variabel penjelas (proksi RGEC) yang signifikan berpengaruh terhadap *financial distress* BPRS di Aceh. ($j = 1,2,3,4,5$)

b. Keputusan tolak H_0 jika G hitung > $\chi^2_{0,05;7}$ atau *p-value* < 0,05

5. Jika keputusan adalah tolak H_0 dapat disimpulkan bahwa minimal terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* BPRS di Aceh.

6. Pengujian parameter secara parsial, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. H_0 : $\beta_j = 0$; tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel prediktor ke-j terhadap *financial distress* BPRS di Aceh.

Haj: $\beta_j \neq 0$; terdapat pengaruh signifikan antara variabel prediktor ke-j terhadap *financial distress* BPRS di Aceh.
 $j = 1,2,3,4,5$

b. Statistik uji yang digunakan adalah uji Wald dengan keputusan tolak H_0 jika $W > \chi^2_{0,05;1}$ atau nilai *p-value* < 0,05

7. Jika keputusan yang diperoleh menolak H_0 , maka variabel prediktor ke-j secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* BPRS di Aceh.

8. Rasio Kecenderungan (*Odds Ratio*), digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui kecenderungan variabel prediktor terhadap variabel respon. Nilai *odds ratio* merupakan nilai dari $\exp(\beta_j)$ pada variabel prediktor yang signifikan mempengaruhi *financial distress* BPRS di Aceh. Nilai β_j yang semakin besar mengindikasikan kecenderungan variabel prediktor terhadap *financial distress* BPRS di Aceh semakin tinggi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum BPRS di Provinsi Aceh

BPRS pertama yang beroperasi di Provinsi Aceh adalah PT BPRS Hareukat yang didirikan pada tanggal 10 November 1991 sebagai BPR (konvensional), kemudian berubah statusnya menjadi BPRS pada 1 Mei 1995 berlokasi di Lambaro Aceh Besar. Akan tetapi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usahanya terhitung sejak 11 Oktober 2019 karena kondisi keuangan yang semakin memburuk serta pernyataan ketidaksanggupan dari pengurus dan pemegang saham untuk menyembatkannya.

Jumlah BPRS di Provinsi Aceh pada akhir Desember 2024 adalah 11 BPRS. BPRS yang ada di Provinsi Aceh ini tidak tersebar secara merata di setiap kabupaten/kota dimana BPRS tersebut hanya ada di 6 kabupaten/kota sedangkan 17 kabupaten/kota lainnya belum ada BPRS. Jumlah BPRS terbanyak terdapat di Kota Banda Aceh yaitu 4 BPRS, selanjutnya Kota Langsa 2 BPRS, sedangkan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Tengah masing-masing terdapat 1 BPRS. Hasil statistik deskriptif variabel penelitian ini terdapat pada beberapa tabel berikut.

Tabel 10. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Respon

No	Nama BPRS	Jumlah Periode yang Mengalami:	
		<i>Non Financial Distress</i>	<i>Financial Distress</i>
1	BPRS Baiturrahman	7	9
2	BPRS Hikmah Wakilah	16	0
3	BPRS Taman Indah Darussalam	3	13
4	BPRS Tengku Chiek Dipante	9	7
5	BPRS Rahmania Dana Sejahtera	11	5
6	BPRS Gayo (Perseroda)	15	1
7	BPRS Rahmah Hijrah Agung	7	9
8	BPRS Adeco	14	2
9	BPRS Serambi Mekah	9	7
Jumlah		91	53

Sumber: Hasil Penelitian (2025, diolah)

Tabel 10 menunjukkan bahwa dari total 144 observasi, yang terdiri atas 9 BPRS selama periode 16 kuartal, terdapat 53 observasi (36,80%) berada dalam kondisi *financial distress*. Dari sembilan BPRS tersebut, hanya BPRS Hikmah Wakilah yang tidak pernah mengalami kondisi *financial distress*. Sementara itu, BPRS lainnya pernah mengalaminya dengan frekuensi yang bervariasi. BPRS Taman Indah Darussalam tercatat sebagai bank yang paling sering mengalami *financial distress*, yaitu sebanyak 13 kuartal. Secara umum, BPRS yang mengalami *financial distress* termasuk ke dalam kelompok bank dengan peringkat kesehatan 4 dan 5. Peringkat 4 mengindikasikan bahwa bank berada dalam kondisi “Kurang Sehat”, yaitu memiliki kelemahan cukup serius yang berpotensi mengganggu kelangsungan usaha apabila tidak segera diperbaiki. Peringkat 5 menunjukkan bank dalam kondisi “Tidak Sehat”, yaitu kondisi keuangan dan/atau manajemen yang sangat lemah, serta menghadapi risiko tinggi terhadap kelangsungan usaha.

Tabel 11 menampilkan beberapa nilai statistik deskriptif penting dari variabel prediktor yang terdiri dari NPF, GCG, ROA, BOPO, dan CAR. NPF memiliki nilai rata-rata sebesar 7,35%, artinya secara umum selama tahun 2021 s.d. 2024 NPF pada BPRS di Provinsi Aceh berada pada peringkat ke-2. Sesuai SE Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /SEOJK.03/2019, maka kondisi NPF tergolong “Sehat”, meskipun tidak dalam kategori terbaik (peringkat ke-1). Ini menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah (macet) pada BPRS secara umum masih dalam batas wajar dan masih terkendali, tetapi sudah menunjukkan tanda-tanda yang perlu diwaspadai agar tidak memburuk. NPF merupakan indikator penting dalam menilai kualitas pembiayaan BPRS

Tabel 11 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Prediktor

	N	Minim um	Maxi mum	Sum	Mean	Std. Deviation
NPF	144	0,47	36,14	1058,40	7,3500	6,47225
GCG	144	2	4	513	3,56	0,634
ROA	144	-0,91	20,04	202,16	1,4039	2,38251
BOPO	144	49,02	122,05	11966,61	83,1015	13,92941
CAR	144	-69,10	56,90	3468,25	24,0851	13,14335
Valid N	144					

Sumber: Hasil Penelitian (2025, diolah)

Nilai minimum untuk NPF sebesar 0,47% terjadi pada BPRS Taman Indah Darussalam yaitu pada bulan Desember 2021 (Q4-2021) sehingga menempatkannya pada peringkat ke-1 dari sisi NPF. Peringkat 1 untuk NPF mengindikasikan kualitas pembiayaan sangat sehat, dan tingkat pembiayaan bermasalah sangat rendah sehingga efektif dalam menyalurkan dan mengelola pembiayaan kepada nasabah dengan risiko gagal bayar yang sangat kecil. Adapun NPF maksimum sebesar 36,14% terjadi pada BPRS Adeco periode Desember 2024 (Q4-2024) sehingga menempatkannya di peringkat ke-5. Artinya, tingkat pembiayaan bermasalah sangat tinggi dan berada dalam kondisi sangat tidak sehat dari aspek kualitas pembiayaan. Risiko gagal bayar nasabah sangat besar, dan hal ini mengancam kelangsungan usaha bank.

Variabel prediktor kedua adalah GCG yang diprosikan dengan jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan jumlah komisaris. Dari Tabel 11 dapat diketahui nilai rata-rata GCG adalah 3,56, artinya secara umum BPRS di provinsi Aceh telah menempatkan 3 orang sebagai pengawas untuk mengawasi secara aktif kegiatan BPRS agar tidak menyimpang baik dari prinsip syariah maupun aspek lainnya. Sesuai aturan BPRS wajib menempatkan minimal 1 orang DPS dan 1 orang komisaris. Nilai minimum adalah 2 orang yang berarti ada BPRS yang hanya menggunakan syarat minimum penempatan dewan pengawas. Angka ini juga berarti bahwa dewan pengawas hanya terdiri dari 1 orang DPS dan 1 orang komisaris. Sementara itu, jumlah angka maksimumnya 4, artinya ada BPRS yang menempatkan 2 orang DPS dan 2 orang komisaris.

ROA merupakan variabel selanjutnya, memiliki nilai rata-rata 1,40%. Sesuai SE OJK No.28 tahun 2019, maka ROA BPRS di Aceh secara umum berada pada peringkat kedua. Hal ini mencerminkan kondisi profitabilitas yang sehat, namun bank perlu meningkatkan efisiensi atau margin untuk mencapai peringkat terbaik. Selama periode penelitian juga terdapat BPRS yang mengalami kerugian sebagaimana rasio ROA terendah adalah -0,91% milik PT BPRS Baiturrahman pada kuartal pertama tahun 2021 dimana angka ini berada pada peringkat kelima. ROA tertinggi sebesar 20,04% terjadi pada PT BPRS Tengku Chiek Dipante pada kuartal ketiga tahun 2021. Hasil statistik deskriptif ROA menggambarkan bahwa BPRS di Provinsi Aceh secara umum mampu mengelola asetnya secara baik untuk menghasilkan laba meskipun ada BPRS yang rugi pada kuartal tertentu.

Rasio berikutnya adalah BOPO dengan nilai rata-rata 83,10%, secara umum masuk kriteria peringkat kedua. Artinya, efisiensi operasional secara umum sehat meskipun belum optimal. Bank masih mampu menjaga proporsi biaya operasional terhadap pendapatannya dalam batas yang sehat. Untuk meningkatkan peringkat, perlu dilakukan penguatan efisiensi biaya atau peningkatan pendapatan operasional. Rasio BOPO tertinggi adalah 122,05% milik PT BPRS Baiturrahman pada kuartal kedua tahun 2021 dimana angka ini berada pada peringkat kelima. BOPO terendah yaitu 49,02% terjadi pada BPRS Gayo (Perseroda) pada kuartal ketiga tahun 2024.

Rasio berikutnya adalah CAR dengan nilai rata-rata 24,09%, artinya secara umum CAR berada pada peringkat pertama (tertinggi) karena di atas 15%. Angka ini mengindikasikan permodalan BPRS di Aceh secara umum sangat sehat. Selama periode penelitian ini CAR terendah adalah -69,10% milik BPRS Gayo (Perseroda) pada kuartal-4 tahun 2024. Angka ini berada pada peringkat kelima dan dapat dikatakan sangat mengkhawatirkan dari sisi permodalan. CAR tertinggi 56,90% milik BPRS T Chiek Dipante kuartal-1 tahun 2021.

Model Penelitian dan Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan model regresi logistik biner karena variabel responnya berupa *dummy*. Persamaannya untuk model penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$\ln \frac{FD_{1,t}}{1-NFD_{1,t}} = \beta_0 + \beta_1 NPF_{i,t} + \beta_2 GCG_{i,t} + \beta_3 ROA_{i,t} + \beta_4 BOPO_{i,t} + \beta_5 CAR_{i,t}$$

Konstanta dan koefisien regresi logistik serta beberapa uji yang dibutuhkan diperoleh dengan menggunakan Software Eviews. Langkah awal adalah melakukan uji *Goodness of Fit* untuk mengetahui kesesuaian model dalam menjelaskan pengaruh dari proksi RGEC terhadap *financial distress* BPRS di Aceh. Statistik uji menggunakan *C* (*chi-square* atau χ^2) dengan pendekatan *Hosmer-Lemeshow* pada $\alpha=5\%$. Hipotesisnya adalah:

- a. H_0 : model yang dibentuk fit, artinya tidak ada perbedaan signifikan antara hasil observasi dengan hasil prediksi.
- b. H_a : model yang dibentuk tidak fit, artinya ada perbedaan signifikan antara hasil observasi dengan hasil prediksi.

Tabel 12. Hasil *Hosmer-Lemeshow* (*Chi-Square*)

H-L Statistic	0.5373	Prob. Chi-Sq(8)	0.9998
Andrews Statistic	48.5828	Prob. Chi-Sq(10)	0.0000

Sumber: Hasil Penelitian (2025, diolah)

Hasil pengolahan data untuk *Hosmer-Lemeshow* Statistic (*chi-square*) dapat dilihat pada Tabel 12. *P-value* H-L Statistic yang dihasilkan adalah 0,9998, berarti lebih besar daripada 5%, sehingga H_0 tidak ditolak. Oleh karena itu model yang dibentuk fit sehingga tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil observasi dengan hasil prediksi, maka model dapat digunakan untuk tahap berikutnya. Adapun hasil regresi logistik dapat dilihat pada Tabel 13 berikut ini.

Tabel 13. Hasil Regresi Logistik dari Model Penelitian

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
NPF	0.239797	0.124281	1.929476	0.0537
GCG	-0.002442	1.018487	-0.002397	0.9981
ROA	-6.567767	1.890604	-3.473899	0.0005
BOPO	0.435115	0.146738	2.965251	0.0030
CAR	0.012494	0.084327	0.148164	0.8822
C	-36.15982	13.96106	-2.590048	0.0096
McFadden R-squared	0.835710	Mean dependent var		0.368056
S.D. dependent var	0.483960	S.E. of regression		0.191204
Akaike info criterion	0.299510	Sum squared resid		5.045157
Schwarz criterion	0.423252	Log likelihood		-15.56469
Hannan-Quinn criter.	0.349792	Deviance		31.12939
Restr. deviance	189.4789	Restr. log likelihood		-94.73943
LR statistic	158.3495	Avg. log likelihood		-0.108088
Prob(LR statistic)	0.000000			
Obs with Dep=0	91	Total obs		144
Obs with Dep=1	53			

Sumber: Hasil Penelitian (2025, diolah)

Berdasarkan Tabel 13 maka model persamaan regresi logistik yang dihasilkan dapat ditulis sebagai berikut:

$$\ln \frac{FD_{1,t}}{1-NFD_{1,t}} = -36,1598 + 0,2398 NPF_{i,t} - 0,0024 GCG_{i,t} - 6,5678 ROA_{i,t} + 0,4351 BOPO_{i,t} + 0,0125 CAR_{i,t}$$

Model regresi logistik ini tidak bisa langsung diinterpretasikan karena koefisiennya masih dalam bentuk logit (*log odds*).

Diperlukan perhitungan tambahan untuk mengubahnya menjadi *odds ratio* agar makna ekonomisnya dapat dipahami. Hasil perhitungan *odds ratio* untuk konstanta dan setiap variabel dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Hasil Perhitungan *Odds Ratio* Model Regresi Logistik

Variabel	Koefisien	<i>Odds Ratio</i> (e^{β_j})	Perubahan <i>Odds</i> ($1 - e^{\beta_j}$) x 100%
C	-36,1598	$\approx 1,98 \times 10^{-16}$	≈ 0
NPF	0,2398	1,271	27,10%
GCG	-0,0024	0,9976	-0,24%
ROA	-6,5678	0,0014	-99,86%
BOPO	0,4351	1,5451	54,51%
CAR	0,0125	1,0126	1,26%

Sumber: Hasil Penelitian (2025, diolah)

Berdasarkan Tabel 14, interpretasi model regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta mengindikasikan bahwa jika semua variabel prediktor bernilai nol, maka peluang *financial distress* pada BPRS di Provinsi Aceh mendekati nol.
2. NPF berpengaruh positif terhadap *financial distress* pada BPRS di Provinsi Aceh. Setiap kenaikan NPF 1% maka peluang *financial distress* naik sebesar 27,10%, sebaliknya setiap penurunan NPF 1% maka peluang *financial distress* akan turun pula sebesar 27,10% dengan asumsi variabel prediktor lainnya (GCG, ROA, BOPO, dan CAR) konstan.
3. GCG berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pada BPRS di Provinsi Aceh. Setiap kenaikan skor GCG 1 unit maka peluang *financial distress* turun sebesar 0,24%, sebaliknya setiap penurunan skor GCG 1 unit maka peluang *financial distress* akan naik sebesar 0,24% dengan asumsi variabel prediktor lainnya konstan.
4. ROA berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pada BPRS di Provinsi Aceh. Setiap kenaikan ROA 1% maka peluang *financial distress* turun sebesar 99,86%, sebaliknya setiap penurunan ROA 1% maka peluang *financial distress* akan naik sebesar 99,86% dengan asumsi variabel prediktor lainnya konstan.
5. BOPO berpengaruh positif terhadap *financial distress* pada BPRS di Provinsi Aceh. Setiap kenaikan BOPO 1% maka peluang *financial distress* naik sebesar 54,51%, sebaliknya setiap penurunan BOPO 1% maka peluang *financial distress* akan turun pula sebesar 54,51% dengan asumsi variabel prediktor lainnya konstan.
6. CAR berpengaruh positif terhadap *financial distress* pada BPRS di Provinsi Aceh. Setiap kenaikan CAR 1% maka peluang *financial distress* naik sebesar 1,26%, sebaliknya setiap penurunan CAR 1% maka peluang *financial distress* akan turun pula sebesar 1,26% dengan asumsi variabel prediktor lainnya konstan.

Tahapan berikutnya adalah melakukan pengujian parameter secara simultan pada tingkat signifikansi 5%. Pengujian ini dilakukan dengan menghitung statistik uji G atau LR *statistic* (*Likelihood Ratio Test*) dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0 \text{ atau } \beta_j = 0$$

RGEC yang terdiri dari NPF, GCG, ROA, BOPO, dan CAR secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* BPRS di Aceh.

Ha: minimal terdapat satu $\beta_j \neq 0$; $j = 1,2,3,4,5$

RGEC yang terdiri dari NPF, GCG, ROA, BOPO, dan CAR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* BPRS di Aceh.

Hasil pengolahan data untuk uji ini dan hasil regresi logistik biner secara keseluruhan dengan menggunakan Eviews 10 dapat dilihat pada Tabel 13. Dari tabel tersebut diketahui nilai LR *statistic* sebesar 158,3495 dengan $p\text{-value} = 0,000$. Angka LR *statistic* kemudian dibandingkan dengan G-tabel (11,07) yang berarti $LR\ statistic > G\text{-tabel}$ sehingga H_0 ditolak. Kesimpulan yang sama juga diperoleh dengan cara membandingkan dengan $p\text{-value}$ pada tingkat signifikansi yang ditetapkan ($\alpha=0,05$) dimana $p\text{-value} < \alpha$ sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian RGEC yang terdiri dari NPF, GCG, ROA, BOPO, dan CAR secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* BPRS di Aceh.

Penentuan tingkat kesesuaian model (*goodness-of-fit*) dalam regresi logistik menggunakan nilai McFadden *R-squared*. Nilai McFadden *R-squared* yang diperoleh adalah 83,57%. Artinya, model regresi logistik yang digunakan memiliki tingkat kesesuaian yang sangat baik, sehingga mampu menjelaskan proporsi yang besar dari variasi data yang diamati. Langkah berikutnya adalah melakukan pengujian parameter secara parsial, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_{0j} : $\beta_j = 0$; Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari prediktor ke- j terhadap *financial distress* BPRS di Aceh.

H_{aj} : $\beta_j \neq 0$; Terdapat pengaruh yang signifikan dari prediktor ke- j terhadap *financial distress* BPRS di Aceh.

$j = 1,2,3,4,5$ (1=NPF; 2=GCG; 3=ROA; 4=BOPO; dan 5=CAR)

Uji yang digunakan adalah uji Wald dengan keputusan tolak H_0 jika $W > \chi^2$ atau $p\text{-value} < 0,05$. Jika keputusan yang diperoleh menolak H_0 , maka variabel prediktor ke- j secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Hasil pengolahan data uji parsial dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Hasil Uji Parsial Model Penelitian

Variabel	z-Statistic	p-value	Keputusan
NPF	1,929476	0,0537	Tidak menolak H_{01}
GCG	-0,002397	0,9981	Tidak menolak H_{02}
ROA	-3,473899	0,0005	Tolak H_{03}
BOPO	2,965251	0,0030	Tolak H_{04}
CAR	0,148164	0,8822	Tidak menolak H_{05}

Sumber: Hasil Penelitian (2025, diolah)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parsial dapat diketahui bahwa ROA dan BOPO secara parsial berpengaruh signifikan terhadap terhadap *financial distress* BPRS di Aceh. NPF secara parsial tidak berpengaruh signifikan pada $\alpha = 5\%$, namun jika α dilonggarkan menjadi 10% maka NPF berpengaruh secara signifikan. Adapun GCG dan CAR secara parsial tidak signifikan.

Uji kelayakan model (*overall model fit*) regresi logistik menyimpulkan bahwa secara simultan variabel-variabel yang mewakili komponen RGEC yaitu NPF, GCG, ROA, BOPO, serta CAR berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* BPRS di Provinsi Aceh. Hasil ini mengindikasikan kesehatan bank tidak dapat hanya dilihat dari satu aspek saja, tetapi merupakan hasil sinergi dari seluruh komponen RGEC. Temuan ini sejalan dengan prinsip modern manajemen risiko perbankan yang dijabarkan dalam kerangka Basel III, di mana penerapan standar modal yang kuat, likuiditas memadai, *counterparty risk management*, dan efektivitas pengawasan secara simultan dapat meningkatkan ketahanan bank terhadap *financial distress* [21].

Relevansi temuan ini semakin nyata jika dikaitkan dengan kondisi empiris BPRS beberapa tahun terakhir sesuai publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data menunjukkan bahwa sebagian BPRS di Aceh pernah memiliki rasio NPF di atas ambang batas sehat (5%), yang menandakan adanya tekanan pada kualitas pembiayaan. Pada saat yang sama, rasio BOPO di banyak BPRS cenderung berada di level yang relatif tinggi, yaitu di atas 80%, yang mencerminkan rendahnya efisiensi operasional. Meskipun demikian, terdapat perbedaan ketahanan antar-BPRS. Beberapa bank yang berhasil mempertahankan CAR di atas ketentuan minimum dan menerapkan tata kelola yang baik cenderung mampu menahan dampak negatif dari tingginya NPF atau BOPO. Sebaliknya, BPRS dengan permodalan tipis dan manajemen risiko yang lemah lebih rentan terhadap *financial distress*, terutama saat terjadi perlambatan ekonomi atau penurunan daya bayar nasabah.

Nilai McFadden *R-squared* yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 83,57%, artinya berada pada level yang sangat tinggi untuk ukuran regresi logistik. Model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan sekitar 83,57% variasi dalam probabilitas terjadinya *financial distress* pada BPRS di Aceh. Tingginya nilai McFadden *R-squared* mengindikasikan bahwa variabel-variabel prediktor yang mewakili pilar RGEC yaitu NPF, GCG, ROA, BOPO, dan CAR memiliki berkontribusi atau akurasi yang kuat terhadap perubahan *financial distress*. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa kerangka RGEC sangat relevan untuk konteks BPRS di Aceh, dimana variasi kondisi permodalan, kualitas pembiayaan, efisiensi operasional, tata kelola, dan profitabilitas sangat mempengaruhi ketahanan bank terhadap risiko *financial distress*. Hal ini juga memperkuat kesimpulan bahwa indikator RGEC secara bersama-sama merupakan kerangka prediksi yang akurat untuk menilai kesehatan BPRS dan memitigasi risiko *financial distress*. Implikasi praktis dari tingginya McFadden *R-squared* ini adalah bahwa kerangka RGEC dapat digunakan sebagai alat deteksi dini (*early warning system*) yang akurat untuk mengidentifikasi potensi *financial distress* di BPRS. Dengan memantau pergerakan indikator NPF, GCG, ROA, BOPO, dan CAR secara berkala, manajemen BPRS dan OJK dapat melakukan intervensi lebih cepat untuk mencegah terjadinya kegagalan usaha. Nilai McFadden *R-squared* yang

tinggi bukan hanya sekadar indikator statistik semata, tetapi juga merupakan bukti empiris bahwa model RGEC memiliki daya jelas yang sangat kuat, landasan teoritis yang kokoh, dan relevansi praktis yang tinggi dalam memprediksi serta memitigasi risiko *financial distress* pada BPRS di Aceh. Temuan ini mempertegas bahwa penguatan seluruh pilar RGEC secara simultan yang meliputi NPF, GCG, ROA, BOPO, dan CAR bukan sekadar rekomendasi regulasi, tetapi merupakan kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas, meningkatkan daya saing, dan memastikan keberlanjutan usaha BPRS di tengah dinamika ekonomi daerah maupun nasional.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel RGEC yang terdiri atas NPF, GCG, ROA, BOPO, dan CAR berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *financial distress* BPRS di Provinsi Aceh, ditunjukkan oleh nilai LR Statistic yang signifikan serta McFadden R² sebesar 0,8357. Secara parsial, NPF berpengaruh positif dan signifikan pada taraf 10%, menunjukkan pembiayaan bermasalah meningkatkan risiko distress meski pengaruhnya relatif lemah. GCG berpengaruh negatif namun tidak signifikan, menandakan praktik tata kelola masih bersifat formalitas regulasi. ROA berpengaruh negatif dan signifikan, sehingga profitabilitas berperan penting dalam menurunkan risiko distress. BOPO berpengaruh positif dan signifikan, mengindikasikan bahwa inefisiensi operasional menjadi penyebab utama kerentanan distress. Sementara itu, CAR berpengaruh positif namun tidak signifikan, menandakan perbedaan kecukupan modal antar BPRS tidak berkontribusi nyata terhadap kondisi distress.

Sebagai tindak lanjut, BPRS perlu memfokuskan strategi pada peningkatan profitabilitas melalui efisiensi operasional, selektivitas pembiayaan, serta monitoring dan restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Implementasi GCG harus diperkuat sebagai mekanisme pengendalian risiko, sementara kecukupan modal tetap dijaga sesuai ketentuan OJK guna menjadi buffer risiko dan menjaga kepercayaan nasabah. Selain itu, diperlukan sistem monitoring keuangan yang komprehensif untuk memantau indikator utama secara real time. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel eksternal serta memperpanjang periode observasi untuk memperoleh gambaran tren *financial distress* yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- [1] M. Husna, "Pencabutan Izin BPRS Hareukat, LPS: Ini Pertama di Aceh," 2019, Banda Aceh. [Online]. Available:

- <https://aceh.tribunnews.com/2019/10/12/pencabutan-izin-bprs-hareukat-lps-ini-pertama-di-aceh>
- [2] B. Kosasih, "Banyak BPR Bangkrut dan Tutup di Indonesia, Apa Penyebabnya?," Jakarta, 2025. [Online]. Available: <https://vibiznews.com/index.php/2025/05/12/banyak-bpr-bangkrut-dan-tutup-di-indonesia-apa-penyebabnya/>
- [3] Otoritas Jasa Keuangan, *POJK Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Indonesia, 2016.
- [4] Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan," 2023, *Otoritas, Jakarta*.
- [5] J. F. Brigham, E.F. dan Houston, *Fundamentals of Financial Management*, 15th ed. Boston Cengage Learning, Inc., 2019.
- [6] T. M. Nakamura, "Analisis Financial Distress Saat Krisis Keuangan Global: Studi Empiris pada BUMN Non-Keuangan," *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, vol. 2, no. 2, pp. 107–124, 2021.
- [7] Otoritas Jasa Keuangan, *POJK Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Indonesia, 2016.
- [8] Otoritas Jasa Keuangan, "Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019," 2019.
- [9] S. B. Yulianto A, "The Internal Factors of Indonesian Sharian Banking to Predict The Mudharabah Deposits," *Review of Integrative Business & Economic Research*, vol. 5, no. 1, pp. 210–218, 2016.
- [10] W. Kuswahariani, H. Siregar, and F. Syarifuddin, "Analisis Non Performing Financing (NPF) secara Umum dan Segmen Mikro pada Tiga Bank Syariah Nasional di Indonesia," *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, vol. 6, no. 1, pp. 26–36, 2020, doi: 10.17358/jabm.6.1.26.
- [11] H. I. Haq and P. Harto, "Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Berbasis RGEC terhadap Financial Distress (Studi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017)," *Diponegoro Journal Of Accounting*, vol. 8, no. 3, pp. 1–12, 2019.
- [12] C. Y. Harahap and Gusniarti, "Pengaruh Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital Terhadap Financial Distress pada Unit Usaha Syariah Periode 2018-2022," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, vol. 6, no. 12, pp. 7125–7139, 2024.
- [13] N. M. M. Andari and G. B. Wiksuana, "RGEC sebagai Determinasi dalam Menanggulangi Financial Distress pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia," *E-Jurnal Manajemen Unud*, vol. 6, no. 1, pp. 116–145, 2017.
- [14] C. Patricia, H. T. Setijaningsih, and Verawati, "Analysis Of The Influence Of Bank Health Level With RGEC Method On Financial Distress Using Altman Z-Score Method," *International Journal of Application on Economics and Business (IJAEB)*, vol. 2, no. 2, pp. 3328–3340, 2024.
- [15] N. Yurivin and W. Mawardi, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financial Distress pada Perusahaan Perbankan di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Swasta Devisa dan Non Devisa Periode 2012-2016)," *Diponegoro Journal of Management*, vol. 7, no. 4, pp. 581–589, 2018.
- [16] F. H. Ermar and Suhono, "Pengaruh RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance Earning, Capital) terhadap Financel Distress," *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, vol. 5, no. 1, pp. 107–118, 2021.
- [17] J. Humaira, B. Barnas, and Kristianingsih, "Pengaruh Kinerja Keuangan dan Penerapan GCG terhadap Potensi Kebangkrutan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, vol. 1, no. 2, 2021.
- [18] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- [19] R. N. I. Nugrohowati and S. Bimo, "Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank dan Eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 42–49, 2019, doi: 10.20885/jeki.vol5.iss1.art6.